



PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA

Rini Riyantini, Rudhy Ho Purabaya
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
rinihoriyantini@gmail.com; udi.hop@gmail.com

ABSTRAK

Tiga aspek yang penting untuk mewujudkan desa yang partisipatif dalam pembangunan adalah perencanaan pembangunan berbasis data desa, pengelolaan aset dan tata kelola keuangan desa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan sangat tergantung pada akses dan pemahaman masyarakat terhadap data dan informasi. Minimnya data dan informasi kebutuhan masyarakat desa yang valid menjadi peluang miskomunikasi dan misinformasi sehingga program yang digulirkan tidak tepat sasaran. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dalam memanfaatkan ketersediaan sistem informasi desa sebagai media komunikasi antarkomunitas. Kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sistem informasi desa. Metode yang digunakan adalah pembelajaran kolaboratif mengenai cara berkomunikasi aktif dengan menggunakan sistem informasi desa melalui penyuluhan dan praktik. Sebelum dan setelah penyuluhan, diberikan evaluasi berupa pretest dan posttest. Hasil tes menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan dari setiap aspek sebesar >20%. Peningkatan hasil tersebut merupakan angka komunikasi partisipasi masyarakat dalam sistem informasi desa yang dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi faktor pendukung hilirisasi dalam pembangunan.

Kata kunci: sistem informasi desa, media, komunikasi partisipatif

PENDAHULUAN

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 86 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlu adanya perencanaan yang baik bagaimana menyiapkan desa untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut tidak hanya berupa kebijakan yang bersifat *top down*, tetapi juga inisiatif yang bersifat *bottom up* agar perencanaan pembangunan berorientasi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan. Untuk menciptakan perencanaan yang baik harus didukung dengan data dan informasi yang akurat, sehingga perlu dibangun sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai *stakeholder*, pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana, serta pengusaha sebagai sponsor penyandang dana untuk *supporting* pembangunan.

Pembangunan sistem informasi desa serta kapasitas sumber daya manusia yang melek teknologi informasi harus menjadi prioritas program pemerintah daerah kabupaten dan kota, sehingga keterbukaan akses antara desa dan kota dapat segera teratasi. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan oleh Kementerian Desa, sehingga program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 2 dapat terukur, sekaligus sebagai pengawasan pembangunan bersumber dana desa yang tepat sasaran.

Belum terbentuknya Pusat Pemberdayaan Informasi Perdesaan (Puspindes) di seluruh wilayah tingkat kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebabkan transparansi informasi desa belum berjalan sehingga berkontribusi terhadap a) partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan pembangunan belum terlaksana, b) basis data potensi desa, kebutuhan desa belum tersedia secara daring sehingga belum ada jaminan akurasi data dan belum dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan program pemerintah untuk percepatan pembangunan desa, c) Pengelolaan aset dan tata kelola keuangan desa sulit diawasi, sehingga pencegahan penyelewengan dana desa sulit dilaksanakan (hanya bersifat kuratif).

Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 7.118,06 hektar, dengan jumlah penduduk 122.838 jiwa yang tersebar di 11 desa. Potensi wilayah terbesar lahan pertanian sehingga penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pembudi daya ikan, juga pedagang sayur. Terdapat dua lokasi potensi wisata alam yang belum tereksplorasi. Terdapat beberapa perajin usaha kecil menengah. Kecamatan Parung Panjang belum memiliki pusat informasi, sehingga kebutuhan komunitas para petani, pembudidaya ikan, pelaku UMKM, pedagang pasar melakukan aktivitasnya secara perseorangan, belum terorganisasi dengan baik, padahal dengan adanya undang-undang desa, otonomi menuju kemandirian desa sangat terbuka. Sistem informasi desa dapat dikelola sebagai pusat informasi sudah merupakan kebutuhan prioritas yang harus segera dibangun. Selain studi deskriptif yang dilakukan di Kecamatan Parung Panjang, dilakukan juga studi literatur melalui media cetak, buku-buku, ataupun media daring wilayah yang telah memiliki Pusat Pemberdayaan Informatika Desa serta menggunakannya secara berkelanjutan. Perencanaan Program Komunikasi yang harus dibangun untuk mengatasi permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah Kecamatan Parung Panjang adalah membangun Pusat Pemberdayaan Informatika Perdesaan dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses melalui android yang telah digunakan oleh sebagian besar masyarakat.

Tiga aspek yang saling berkaitan dalam komunikasi pembangunan, yaitu a) pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut, b) pendekatan yang lebih spesifik, memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, c) pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal/desa (Sultan, 2011). Berbagai paradigma teori komunikasi pembangunan dari yang linier sampai paradigma yang bersifat partisipatoris. Pramono (2016) menyatakan bahwa dalam pendekatan partisipatoris, semua masalah yang dihadapi merupakan masalah bersama sehingga cara menyelesaikannya pun perlu dipikirkan bersama. Karena aktivitas komunikasi terjadi dalam ruang publik, hal itu memungkinkan setiap orang dapat melakukan akses informasi dan dialog terbuka secara merata. Selain itu, pendekatan partisipatoris memfokuskan pada penggalan dan pemanfaatan potensi media lokal (*indigenous media*) sebagai alternatif penggunaan media komunikasi modern bagi tumbuhnya partisipasi warga masyarakat setempat.

Sebelum terbangun pusat pemberdayaan informasi, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sistem informasi desa dalam menunjang pemenuhan kebutuhan terkait pengelolaan usahanya sebagai petani, pembudidaya ikan, UKM, serta para aparat desa dan kecamatan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap sebagai penyedia informasi dalam keberlangsungan sistem tersebut. Telah tersedia sistem informasi desa sejak diundangkannya UU desa sejak tahun 2014, selayaknya pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat desa sendiri dan masyarakat sekitar. Berdasarkan studi



pendahuluan, sistem tersebut desa yang telah terbangun belum dimanfaatkan secara maksimal baik dari aspek pengisian data yang berupa informasi aspek-aspek yang terkait dengan potensi wilayah belum tersedia sehingga untuk mencapai keterbukaan kebutuhan pembangunan dari hulu ke hilir belum dapat terpenuhi. Hal itu akan berdampak pada masyarakat pengguna informasi, yang tidak terpenuhi juga, karena sistem belum terkelola dengan baik.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan sistem belum terkelola dengan baik, di antaranya pemahaman terhadap sistem informasi, baik secara pengelolaan maupun pemanfaatan sebagai media informasi sehingga kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, sasaran khalayak pada kegiatan ini adalah aparat desa yang memiliki tupoksi sebagai pengelola informasi di level kecamatan dan level perdesaan. Pengelola sistem menjadi prioritas, karena jika sistemnya tidak dikelola dengan baik, data serta informasi dapat keliru.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan SID sebagai media informasi dalam mengirim dan mencari informasi sesuai dengan kebutuhan, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui program pengabdian kepada masyarakat multitaun dengan tahapan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No	Waktu	Materi	Sasaran
1	Tahun I	1. Penyuluhan fungsi dan manfaat SID 2. Pelatihan mengoperasikan SID 3. Pelatihan menulis dan desain pesan	Operator SID perwakilan Desa dan kecamatan
2	Tahun II,	1. Pelatihan cara penyajian data 2. Pendampingan pengembangan <i>web</i> desain, pembuatan photo berita SID	UMKM, kelompok masyarakat

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahun pertama. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan sistem informasi desa sebagai media komunikasi masyarakat kepada Operator SID di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang berjumlah 26 orang. Mereka terdiri atas perwakilan desa sebanyak 2 orang setiap desa serta perwakilan kecamatan sebanyak 4 orang. Pengetahuan tentang pentingnya pemanfaatan sistem informasi desa yang diberikan meliputi materi 1) sistem informasi desa (SID) fungsi dan manfaatnya, 2) teknik membuat pesan yang baik, dan 3) cara pengoperasian SID sebagai pusat informasi.

METODE KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi serta praktik mengoperasikan SID, yang dilakukan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi, Waktu dan Khalayak Sasaran

No	Materi	Waktu Pelaksanaan	Khalayak Sasaran
1	Penyuluhan fungsi dan manfaat SID	22-23 Juli 2019	Operator SID
2	Pelatihan mengoperasikan SID	9-10 Agustus 2019	perwakilan dari desa dan kecamatan
3	Pelatihan menulis dan mendesain pesan	Agustus-September 2019	sebanyak 26 orang

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan persetujuan khalayak sasaran yang memiliki kegiatan usaha setiap hari sehingga dijadwalkan pada akhir minggu ketika mereka tidak bekerja. Untuk mengukur keberhasilan penyuluhan fungsi dan manfaat SID, mengoperasikan SID, serta menulis dan merancang pesan, sebelum memperoleh materi penyuluhan dan pelatihan, peserta diminta untuk mengisi dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai bentuk pretes sekaligus memetakan sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang akan diberikan sekaligus untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal yang dimiliki terkait dengan pemanfaatan sistem informasi desa. Setiap materi penyuluhan diberikan lima pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka sehingga jumlah seluruhnya lima belas pertanyaan. Waktu yang disediakan untuk pretes tiga puluh menit.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Parung Panjang dilakukan selama tiga bulan, yaitu Juli sampai dengan September 2019. Sebelum menentukan tahapan kegiatan, dilakukan analisis kondisi eksisting wilayah tersebut terkait dengan SID yang dapat diakses, tetapi ketika diperlukan data tentang potensi Kecamatan Parung Panjang, belum tersedia pada sistem tersebut, sehingga diperlukan proses pendampingan untuk memanfaatkan SID yang sudah terbangun agar keterkaitan antara desa dan pemerintah pusat dapat terjalin dengan baik dan menjadi dasar pembangunan partisipatoris. Untuk memetakan kebutuhan sasaran pengabdian, digunakan analisis SWOT sebagai berikut.

1. Analisis potensi yang merupakan aspek kekuatan Kecamatan Parung Panjang adalah sudah adanya SID, komunitas menghasilkan komoditi potensial, terdapat potensi wisata yang perlu dipromosikan.
2. SDM belum dapat memanfaatkan SID sebagai sumber informasi karena kurang kompeten dalam bidang sistem informasi ataupun pengemasan pesan.
3. Terdapat peluang untuk mempromosikan potensi wilayah serta komoditas unggulan lokal serta potensi pariwisata yang dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan ataupun pemerintah daerah/pusat sebagai analisis kebutuhan wilayah.
4. Terdapat potensi ancaman ketika SID tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, terhambatnya pembangunan desa ataupun kurangnya transparansi penggunaan dana desa.

Penentuan khalayak sasaran menjadi analisis pertimbangan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kearifan lokal secara berkelanjutan, sehingga perlu dipetakan kelompok mana saja yang memerlukan SID sebagai sumber informasi. Beberapa kelompok komunitas yang terdapat pada masyarakat Kecamatan Parung Panjang, antara lain petani, pembudidaya ikan, UMKM, karang taruna, PKK, pengajian, dan masyarakat yang bekerja serta aparat pemerintahan. Secara potensial perangkat desa dan kecamatan menjadi kelompok sasaran pertama untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai operator SID, yang diharapkan dapat menjadi motivator sekaligus penggerak untuk kelompok masyarakat yang lain.



Berdasarkan pemetaan yang dilakukan melalui pretes terhadap pemahaman serta pengetahuan dan cara mengoperasikan SID dari khalayak sasaran program diperoleh gambaran hasil yang belum maksimal, bahkan dalam hal menjelaskan fungsi serta tujuan SID masih perlu penyuluhan dan pelatihan. Evaluasi awal pada tahun pertama hanya dapat dilakukan pada level kognitif khalayak sasaran, yaitu mengukur tingkat pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai hasil penyuluhan baru dapat diukur dengan membandingkan hasil pretes dan postes dari peserta yang mengikuti pelatihan. Memperhatikan hasil skor, terdapat perubahan dari sebelum dan setelah pemberian materi terkait pemanfaatan SID. Akan tetapi, untuk berfungsinya SID secara berkelanjutan serta menjadi pusat informasi yang data yang berasal dari hilir tidak dapat terpenuhi hanya dengan pemberian penyuluhan yang sesaat dengan memberikan pelatihan untuk merancang pesan yang baik yang dapat dimasukkan ke dalam SID sebagai informasi yang bermanfaat bagi sumber dan khalayak.

Tabel 2. Perbedaan Pretes dan Postes

No	Aspek	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Mengetahui SID	80	100
2	Memahami tujuan	57	80
3	Dapat menunjukkan	65	98
4	Dapat menjelaskan fungsi	52	72
5	Suka membuka SID	45	80

Perbandingan hasil pretes dan postes (Tabel 2) tidak dapat dijadikan ukuran untuk keberlanjutan berfungsinya SID yang dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan komunitas yang terdapat di Kecamatan Parung Panjang, tetapi perlu tindak lanjut pemberdayaan yang mengarah pada komunikasi partisipatif masyarakat terhadap pemanfaatan SID. Sajian informasi yang dibutuhkan harus timbal balik, sehingga perlu pendampingan sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam merencanakan program dana desa. Di sisi lain sajian informasi merupakan promosi desa dengan data potensi wilayahnya untuk membuat perencanaan program komunikasi berbasis potensi desa. Seperti yang diungkapkan Hamad (2016) bahwa perencanaan program komunikasi merupakan upaya membuat rancangan pelaksanaan suatu program komunikasi untuk mengkampanyekan, menyosialisasikan, atau mempromosikan suatu produk (program, barang, jasa, atau lembaga) kepada khalayak sasaran dengan harapan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk produk yang disosialisasikan dapat berupa jasa, dan lembaga berupa hasil penelitian, serta lembaganya adalah Pusat Pemberdayaan Informatika Perdesaan (Puspimdes).

Selanjutnya, Windahl, Signizer, dan Olson dalam Hamad (2016) menyebutkan perencanaan komunikasi instrumental memiliki karakter sebagai berikut:

- pekerjaan yang dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang, dengan penekanan jangka panjang (*longterm planning*),
- komunikasi yang direncanakan dari bawah (*bottom up*) berdasarkan hasil penggalian terhadap aspirasi dan kebutuhan khalayak,

- c. komunikasi bertujuan lebih umum dan luas (*ultimate purpose*),
- d. komunikasi berorientasi kepentingan penerima (*audience oriented*).

Hamad juga mengutip Mujica dalam Simmons (1990) mengemukakan langkah-langkah perencanaan kampanye yang efektif, yaitu

- a. merancang pesan yang menarik, memilih media yang tepat, menetapkan target sasaran yang jelas, dan mengeksekusi pesan pada saat yang tepat;
- b. membuat segmentasi khalayak sebagai pertimbangan efisiensi pembiayaan digali potensi desa;
- c. melakukan riset evaluasi untuk mengukur keberhasilan serta umpan balik atas pelaksanaan diseminasi;
- d. memilah usaha secara proporsional dalam mencapai target khalayak sesuai potensi dampak yang ditimbulkan.

Tujuan komunikasi meliputi aspek kognisi, afeksi, serta behavior dari khalayak sasaran sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Objek yang dikomunikasikan merupakan materi atau produk yang harus disampaikan kepada khalayak, sehingga PPK harus menguasai produk yang akan disampaikan kepada khalayak. Kegiatan komunikasi pesaing juga harus menjadi pertimbangan PPK dalam rangka menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program komunikasi, termasuk analisis situasi lingkungan serta kondisi program yang akan dikomunikasikan. Khalayak sasaran yang menjadi target populasi juga menjadi faktor penting yang harus dikenali oleh PPK, bagaimana kondisi dan segmentasi khalayak berdasarkan aspek geografis, demografis, dan sosiopsikologis.

Analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan meliputi pesan yang disampaikan, media yang digunakan, serta komunikator yang menyampaikan. Bagaimana mendesain pesan serta memilih bahasa yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan kondisi khalayak sasaran. Pemilihan media yang digunakan juga harus mempertimbangkan kondisi lokasi serta aspek sosial ekonomi khalayak sasaran. Pemilihan komunikator menjadi sangat penting karena menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program komunikasi sehingga harus benar-benar memerhatikan kredibilitas, kemampuan komunikasi, serta etiket dalam berkomunikasi.

Untuk menjamin keberhasilan program, PPK harus dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Sistematis berarti tersusun secara jelas dan konsisten berdasarkan tahapan kegiatan yang satu dengan lain saling berhubungan dan kesinambungan. Pendekatan yang digunakan dalam PPK ini berdasarkan pendekatan SOSTAC (Smith dalam Hamad, 2016) yang terdiri atas tahapan analisis situasi, tujuan, strategi, taktik, rencana aksi dan kontrol.

Analisis situasi dilakukan terhadap produk yang akan didiseminasikan, analisis terhadap khalayak sasaran, serta analisis terhadap media yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Hasil analisis menjadi dasar untuk menetapkan tujuan yang terdiri atas tujuan strategis yang bersifat umum, dan pragmatis yang spesifik dengan prinsip SMART (*scientific, measurable, achievable, realistic, time bounded*). Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan strategi komunikasi yang merupakan pendekatan yang paling tepat untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Strategi dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa cara (*tactics*) yang berupa pedoman operasional strategi, baik terkait dengan pesan, media, maupun komunikator agar dapat implementatif. *Tactics* tidak dapat implementatif jika tidak ada rencana aksi yang merupakan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh tim di lapangan. Untuk menjamin rencana tersebut dilaksanakan, diperlukan monitoring dan evaluasi (kontrol).



Implementasi program perencanaan komunikasi diawali dengan analisis keterkaitan para pihak antara pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Kecamatan Parung Panjang, yang terdiri atas sebelas desa, dan tim PPK. Tujuan yang akan dicapai dalam PPK adalah tersedianya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Parung Panjang, untuk itu perlu Tim PPK menetapkan tahapan program, analisis data faktor penghambat lingkungan, misalnya fanatisme masyarakat terhadap IT, waktu untuk menemui masyarakat, serta mengumpulkan data-data tentang segmentasi masyarakat berdasarkan geografis, demografis, serta sosial budaya yang harus dikomunikasikan melalui forum *focus group discussion* (FGD) kepada camat, para kepala desa, serta *opinion leader*, sehingga mereka dapat membantu meminimalisasi faktor penghambat serta dapat memberikan alternatif solusi terkait waktu dalam menemui masyarakat.

Tujuan strategis pembangunan Puspindes adalah merealisasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 86 ayat (1), khususnya di wilayah Pemerintah Kecamatan Parung Panjang dengan menyediakan layanan SID. Tujuan spesifiknya adalah membantu menyiapkan SDM pengelola SID dengan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi SID yang dikembangkan oleh PUSPINDES serta pelatihan penggunaan perangkat dan aplikasi TIK (teknologi informasi dan komunikasi) bagi staf dan perangkat desa di Kecamatan Parung Panjang. Perencanaan strategis dapat dilakukan melalui kemitraan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah tersebut untuk memasukkan program aplikasi sistem informasi desa ke dalam materi komputer yang diajarkan, sehingga siswa-siswa tersebut dapat dijadikan relawan tutor baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar tempat tinggal. Bagi perangkat desa beserta staf dapat dikirim untuk pelatihan profesional yang bersertifikat dengan biaya dari kabupaten.

Taktik yang dapat digunakan dalam penyampaian informasi Puspindes adalah taktik pengemasan pesan yang tidak formal yang disesuaikan dengan karakteristik khalayak, misalnya dalam sosialisasi kepada kelompok petani, dilakukan di sawah tempat mereka bekerja pada jam istirahat, pada saat ada kerja bakti, komunitas pengajian, posyandu, komunitas ibu PKK, ataupun arisan. Penyampaian pesan tidak memerlukan waktu khusus, tetapi *on the job training* jika untuk pegawai. Pesan dapat disampaikan melalui spanduk, misalnya yang berhubungan dengan kode akses, cara penggunaan fitur, sehingga masyarakat hapal, atau selebaran leaflet yang menarik serta penggunaan media sosial Facebook, Twiter, Instagram, dan lainnya dengan gambar-gambar yang menarik dan tidak membosankan. Komunikator dapat dibantu oleh siswa yang ada, kader PKK, ibu pengajian, *opinion leader*, ataupun selebriti dalam suatu even acara.

Rencana aksi merupakan inti dari PPK, yang merupakan dasar pelaksanaan program yang harus dipertimbangkan baik dari aspek sumber daya (manusia, pembiayaan, fasilitas/perangkat IT), ketersediaan data, serta jaminan keberlanjutan program, yang meliputi sumber, pesan, saluran, penerima, dan dampak. Peningkatan pengetahuan tentang SID yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan pendampingan praktik merancang pesan yang baik merupakan tahap awal untuk komunikasi pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan perencanaan program komunikasi untuk menumbuhkan komunikasi partisipatif masyarakat dalam mengelola SID sebagai media komunikasi antara pemerintah pusat dan desa.

Tersedianya informasi yang akurat berdasarkan kondisi faktual kebutuhan masyarakat desa menjadi bahan informasi antara hilir dan hulu sehingga menjadi pertimbangan pengambilan putusan pemerintah pusat dalam pembangunan. Potensi

serta kebutuhan masyarakat perdesaan dalam segala aspek, apabila tercantum dalam SID, dapat menjadi ajang promosi pembangunan dan pengembangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Peningkatan pengetahuan tentang SID yang dilakukan melalui ceramah, diskusi, serta praktik menulis pesan cukup memberikan perubahan pengetahuan para petugas kecamatan dan desa untuk mulai membuka dan memanfaatkan SID sebagai sumber informasi perlu dikelola secara berkelanjutan melalui perencanaan program komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Parung Panjang dari berbagai komunitas.

Pemberdayaan komunikasi partisipatif akan lebih memudahkan pemanfaatan SID yang lebih cepat berkembang dibandingkan dengan komunikasi strategis yang bersifat *top down* karena sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Badri, M. (2016). Pembangunan perdesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, studi pada gerakan desa membangun. *Jurnal Risalah*, 27(2), 62-73.
- Badri, A. <http://www.riapos.co/2699-opin-pentingnya-sistem-informasi-pembangunan-desa;html>; 22 Pebruari 2014.
- Hamad, I. (2016). *Perencanaan Program Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Irawan, F.,A., Nurrahmad, L. (2019). Peningkatan softskill dibidang sport recreation melalui pelatihan dan pendampingan fotografi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/Volume2/Nomor1>, 32-43.
- Pramono. (2016). Pembangunan dan media massa: Suatu telaah historis, paradigmatic dan prospektif. *Ettisal Journal Of Communication*,1(1), 39-54
- Purwati, P., Japar, M., Wardani, S., & Rohmayanti, R. (2019). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua untuk mencegah bullying guna mewujudkan desa layak anak. *Carade Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228-233.
- Wibisono, N. & Purnomo, H. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 2, 8-19.
- Zulfa, I., M., Handrianto,P. , Wardani, P., Kusumo, G. (2018). Peningkatan pemahaman masyarakat Bojonegoro tentang penggunaan obat melalui penyuluhan penggunaan obat yang benar, Desa Drenges Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Science and Social Development*,1(2), 69-74.